

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Demokrasi secara harfiah memiliki arti pemerintahan oleh rakyat merupakan pemahaman mendasar dan definisi yang telah digunakan secara luas. tidak saja didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, tetapi juga pemerintahan untuk rakyat, yaitu pemerintah bertindak sesuai dengan kehendak rakyat.

Pemerintahan demokratis yang ideal harus bekerja dengan baik sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyatnya. Praktik semacam itu sejauh ini belum pernah terjadi dan mungkin tidak akan bisa dicapai, akan tetapi demokrasi ideal yang sempurna tetap menjadi tolak ukur sebagai sumber inspirasi rezim demokrasi (Widianingsih, 2017).

Negara Demokrasi seperti Indonesia telah melaksanakan amanat konstitusi berupa dilaksanakannya pemilihan umum secara langsung. Rakyat Indonesia berada di urutan tertinggi dalam hierarki sistem ketatanegaraan Indonesia, yang berarti hal ini merupakan perwujudan dari nilai kerakyatan yang terkandung dalam Pancasila. Pelaksanaan pemilihan umum secara reguler dan rutin setiap 5 tahun sekali menjadikan iklim politik yang sehat karena setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Pemilihan umum sebagai penerapan pesta demokrasi di Indonesia dapat dijadikan pembelajaran pendidikan politik bagi

masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik (Wibowo, Wardhana, Nurgiansah, 2022).

Pelaksanaan sistem demokrasi konstitusional merupakan kedaulatan rakyat, menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Melaksanakan kedaulatan bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan suatu kebijakan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu.

Salah satu cara pengambilan keputusan dan penyaluran pendapat secara langsung dapat dilakukan melalui pemilu umum (general election). Makna “kedaulatan berada di tangan rakyat” dalam hal ini, bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan (Kodiyat, 2019).

Dalam demokrasi, masyarakat memilih wakil rayat yang berasal dari partai politik. Berbagai pandangan tentang partai politik ada sebagian yang mengatakan bahwa partai politik adalah "organisasi", tetapi ada pula sebagian yang mengatakan "perkumpulan" atau sebagian yang lain mengatakan “kelompok”. Istilah-istilah ini merujuk pada satu persepsi yang sama, yakni partai politik merupakan kumpulan orang-orang atau sekelompok kecil orang yang memiliki kehendak dan cita-cita yang sama. Cita-cita yang dimaksud direfleksikan dalam bentuk visi-misi bersama dan program kerja.

Kontekstualisasi reflektif terhadap cita-cita itulah yang dirumuskan dalam asas dan ideologi perjuangan partai. Semakin progresif rumusan-rumusan visi-misi dan program, maka itu menunjukkan ideologi partai semakin terdorong ke arah perjuangan yang juga progresif, yang tentu saja berimplikasi pada sikap-sikapnya yang reaksioner pada apa yang nyata dalam politik (Jurdi, 2020).

Salah satu partai terkemuka yang ada di Indonesia ada Partai Demokrat yang resmi didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI pada tanggal 10 September 2001, Di tahun debutnya mengikuti Pemilu Legislatif tahun 2004, Partai Demokrat berhasil meraih peringkat ke 5 dengan meraih suara sebanyak 7,45% (8.455.225) dari total suara dan mendapatkan 57 kursi di DPR, meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 4%. Di tahun 2009 partai demokrat tetap menjadi pemenang dengan memperoleh 150 kursi (26,4%) di DPR RI, setelah mendapat 21.703.137 total suara (20,4%). Pada Pemilu 2014, jumlah perolehan suara dan perolehan kursi di DPR untuk Partai Demokrat berada di posisi keempat dari 10 partai di DPR, dengan perolehan suara sebanyak 10,19% suara nasional (12.728.913). di tahun 2019, mengalami penurunan Partai Demokrat menempati posisi ketujuh dari 9 partai di DPR, dengan perolehan suara sebanyak 7,77% suara nasional (10.876.507) (Partai Demokrat, 2023).

Partai demokrat sendiri memiliki banyak cabang di seluruh penjuru Indonesia termasuk di kabupaten Ogan Komering Ilir partai demokrat sendiri memiliki agenda besar dalam program umum Partai Demokrat antara lain

mencetak SDM yang unggul dan militan, memperkuat kepemimpinan dan manajemen yang efektif, memperkuat komunikasi politik yang efektif di setiap lini, meningkatkan program-program pengabdian masyarakat, membina dan memperluas jaringan konstituen, memenangkan suara generasi muda, menyukseskan pemilihan kepala daerah 2020-2024, menyukseskan pemilihan legislatif 2024, dan menyukseskan pemilihan presiden 2024 (Partai Demokrat, 2023).

Menariknya di daerah Kabupaten Ogan Komering untuk menghadapi Pemilu 2024 memfokuskan Tiga agenda besar dalam program umum partai Demokrat seperti yang di sampaikan oleh ketua DPC Kabupaten Ogan Komering dalam berita Republik merdeka antara lain, siap menerima kursi terbanyak di pemilihan legislatif sehingga Partai Demokrat mampu menduduki kursi pimpinan DPRD OKI sesuai target yang yang ditetapkan, siap mengawal dan memenangkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono untuk menjadi Presiden RI, dan siap mengawal dan memenangkan H. Muchendi Mahzareki yang sudah jauh-jauh di persiapkan untuk menjadi Bupati OKI 2024 mendatang ( Republikmerdeka, 2022).

Hal tersebut juga sejalan dengan visi misi Ketua DPC Kabupaten Ogan Komering yaitu visinya Menjadikan Partai Demokrat Menjadi Salah Satu Partai Yang Besar Dan Kuat Di Kabupaten OKI Yang Merupakan Partai Yang Santun, Cerdas, Dan Religius Pada Masa Mendatang sedangkan misinya yaitu Berusaha Untuk Menjadi Pemenang Pemilu Legeslatif Dan Pemilu Presiden Pada Tahun 2024, memperkuat jaringan partai, dan menjalin

komunikasi serta kordinasi yang baik dengan setiap kebijakan strategis (Detiksumsel, 2022).

Pada pemilihan legislatif Kabupaten Ogan Komering memiliki 45 anggota yang terdiri dari 11 partai politik, dengan mayoritas diraih oleh partai demokrasi Indonesia perjuangan. Dalam periode 2014-2019 partai PKB memperoleh 3 kursi, Gerindra 5 kursi, PDI-P 9 kursi, Golkar 5 kursi, Nasdem 3 kursi, PKS 3 Kursi, Perindo 0 Kursi, PAN 5 Kursi, Hanura 4 Kursi, Demokrat 7 Kursi, dan PBB 1 kursi sedangkan pada periode 2019-2024 partai PKB memperoleh 5 kursi, Gerindra 5 kursi, PDI-P 7 kursi, Golkar 5 kursi, Nasdem 4 kursi, PKS 3 Kursi, Perindo 1 Kursi, PAN 6 Kursi, Hanura 4 Kursi, Demokrat 4 Kursi, dan PBB 1 kursi. Dari data tersebut partai demokrat mengalami penurunan tiga kursi dalam pemilihan legislatif yang pada periode 2014-2019 memperoleh 7 tempat kini berkurang pada periode 2019-2024 (Komisi Pemilihan Umum Sumsel, 2022)

Sebagai institusi politik demokratis, partai politik memiliki posisi yang sangat penting di negara-negara demokrasi. Fungsi utama dari partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang disusun melalui pemilihan umum. Dalam menjalankan fungsinya, dalam suatu sistem partai politik memiliki beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut tentu berkaitan dengan hal-hal politik seperti, kampanye, seleksi calon-calon perwakilan yang akan duduk di kursi pemerintahan, dan melaksanakan fungsi pemerintahan. Salah satu fungsi Partai politik adalah sosialisasi politik, menurut Mary G. Kweit dan Robert W. Kweit sosialisais

politik merupakan proses seorang individu belajar tentang politik yang akhirnya akan terbentuk menjadi orientasi politik dan bertujuan untuk stabilitas suatu sistem politik. Dengan demikian proses sosialisasi politik membawa misi untuk membentuk orientasi politik demi tercapainya stabilitas (Ramadanty, 2019).

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang “Sosialisasi Politik Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Ogan Komering Ilir Untuk Tiga Agenda Besar Partai Pada Pemilu 2024”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari Latar Belakang tersebut, maka diperoleh Rumusan Masalah sebagai berikut:

Bagaimana Sosialisasi Politik Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Ogan Komering Ilir Untuk Tiga Agenda Besar Partai Pada Pemilu 2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

Untuk mengetahui sosialisasi politik dewan pimpinan cabang (DPC) partai demokrat Ogan Komering Ilir untuk tiga agenda besar partai pada pemilu 2024.

## **D. Manfaat penelitian**

### 1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan serta sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan tinggi dan berharap dapat bermanfaat bagi kajian ilmu politik terutama tentang kekuasaan politik, partai politik, fungsi, sosialisasi, dan pemilu ditahun 2024 mendatang.

### 2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis manfaat hasil penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai strategi sosialisasi politik untuk mensukseskan tiga agenda besar partai demokrat dalam melaksanakan program kerja yang mampu merebut kursi terbanyak dalam pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan bupati Ogan Komering Ilir tahun 2024. kajian ilmiah bagi penulis selaku insan akademis dalam melaksanakan penelitian, penelitian ini juga diharapkan bisa memberi kontribusi bagi pembaca dan menjadi referensi bahan bacaan.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Beberapa penelitian dan Jurnal yang memiliki Keterkaitan karena mengandung isi yang sesuai. Penelitian ini di ambil dari jurnal yang dilakukan oleh :

1. Jurnal Ansar Suherman yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Partai Politik Terhadap Partisipasi Pemilih umum Pada Pemilihan Bupati 2017 Di Kelurahan Busoa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan.

Penelitian ini difokuskan pengaruh sosialisasi partai politik terhadap partisipasi pemilih umum pada pemilihan Bupati 2017 di Kelurahan Busoa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji-t menunjukkan bahwa Thitung pada variabel sosialisasi partai politik yaitu sebesar 6,231 dan signifikan pada angka 0,000. Dimana nilai signifikan lebih kecil dibandingkan angka signifikansi yang ditetapkan ( $0,000 < 0,05$ ). Maka dapat ditarik kesimpulan H1 diterima dan Ho di tolak. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang positif antara variabel sosialisasi partai politik terhadap partisipasi pemilih umum (Suherman, 2018).

2. Jurnal Suci Iman Akbar dan Khairulyadi berjudul Sosialisasi dan afiliasi partai politik : analisa kecenderungan mahasiswa terhadap partai politik.

Hasil dari penelitian adalah proses yang diawali dengan upaya partai politik dalam mensosialisasikan ideologi partai dengan melakukan interaksi dengan mahasiswa melalui sebuah komunikasi yang terjalin dari hubungan kerjasama antara kedua belah pihak, sehingga terjalin ikatan yang memberikan makna dan nilai dari partai politik kepada mahasiswa sehingga mahasiswa memiliki ketertarikan untuk bergabung kepada partai politik tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya sosialisasi maka mempengaruhi mahasiswa untuk berafiliasi terhadap partai politik tertentu.

Selain itu proses sosialisasi yang terjadi pada kalangan mahasiswa juga dapat melalui inisiatif dari para tokoh partai politik tersebut, dengan cara menggunakan jabatan pemerintahannya untuk mengajak para mahasiswa bersilaturahmi kemudian dalam pertemuan tersebut maka proses sosialisasi terjadi dan Selain itu proses sosialisasi politik terhadap mahasiswa juga dapat terjadi atas dorongan dari mahasiswa itu sendiri.

Salah satu kekuatan para tokoh partai politik dalam mensosialisasikan politik kepada mahasiswa adalah ketika tokoh tersebut sedang menjadi pejabat publik karena apabila jabatan tersebut sedang tersemat semakin menyakinkan para mahasiswa dalam menerima sosialisasi politiknya (Akbar and Khairulyadi, 2017).

3. Jurnal Ade Kurnia Hia berjudul Pengaruh sosialisasi politik partai perindo terhadap pembentukan budaya politik masyarakat parapat di kecamatan girsang sipangan bolon kabupaten simalungun.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa mayoritas budaya politik masyarakat masih cenderung rendah disebabkan media sosialisasi politik yang digunakan seperti spanduk, media massa dan media elektronik yang digunakan masih belum sepenuhnya dapat menarik simpatik masyarakat untuk bergabung dalam ranah politik.

Dari hasil nilai angket didapatkan hanya 28% masyarakat yang simpatik; pendidikan politik yang dilakukan melalui pengarahannya, penyuluhan, penyeberan informasi politik, belum sepenuhnya diterima masyarakat dikarenakan pola pikir masyarakat yang masih menganggap

politik itu kotor; nilai-nilai, norma, dan simbol politik hanya 31% masyarakat yang memahami; pemahaman masyarakat mengenai politik hanya sebagian besarnya saja, 61% masyarakatnya juga mengerti politik tapi tidak mau ikut berpartisipasi didalamnya. Hal ini disebabkan oleh faktor lainnya seperti masih cenderung ikut-ikutan, status sosial ekonomi, dan sikap pragmatis oportunistis.

Pengaruh sosialisasi politik Partai Perindo terhadap pembentukan budaya politik masyarakat Parapat dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pengurus Partai Perindo dan angket yang disebarakan kepada masyarakat dimana masyarakat sosialisasi politik yang dilakukan Partai Perindo menambah kesadaran masyarakat untuk ikut aktif dalam kehidupan politik betapapun kecilnya partisipasi mereka didalam suatu kehidupan politik itu (Hia, 2017).

4. Jurnal Muhammad Arman asriani berjudul Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Politik Dan Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera Majene Periode 2020-2025.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera dalam melakukan sosialisasi politik dan pendidikan politik di masyarakat yaitu dengan caramelaksanakan sosialisasi terkait ideologi partai, dan visi-misi partaiserta sosialisasi kepartaian dengan melalui pemberian bantuan proram kepada masyarakat dan sosialisasi melalui bantuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sementara pendidikan politiknya yaitu melalui pembinaan

politik maupun pembinaan keagamaan karena Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai politik yang berideologi islam.

Sementara itu dalam mengukur tingkat efektivitas Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Majene dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik dan pendidikan politik, yaitu tergolong kurang efektif berdasarkan indikator pencapaian tujuan menurut teori Duncan. Hal tersebut diketahui bahwa Partai Keadilan Sejahtera di Majene memiliki beberapa kendala dan hambatan dalam menjalankan program sehingga program tersebut biasanya tidak terlaksana atau terwujud di masyarakat (Arman, Muhammad, and Asriani, 2023).

5. Jurnal Ali Imron berjudul Pelaksanaan Sosialisasi Politik Oleh Partai Golongan Karya Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Tahun 2014 Di Desa Sukasukur Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Pelaksanaan Sosialisasi Politik oleh Partai Golkar pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Sukasukur Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan secara optimal namun masih dalam kategori rendah untuk sarana teman pergaulan.

Sosialisasi Politik yang dilakukan oleh Partai Golkar pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 kurang begitu di pahami oleh masyarakat karena waktu pelaksanaan sosialisasi pemilihan Presiden yang dilakukan dalam sosialisasi hanya satu hari dan pelaksanaan

mengakibatkan masih banyak masyarakat yang kurang mengerti pelaksanaan memilih pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2014 di Desa Sukasukur Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.

Upaya yang dilakukan berupa Partispasi politik masyarakat melalui keaktifan masyarakat dengan datang ke TPS dan keaktifan dalam mengikuti jalannya pemungutan suara sampai dengan perhitungan suara pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Imron, 2016).

perbedaan dari penelitian saya dengan jurnal tersebut yaitu terdapat perbedaan tempat, tahun, dan institusi yang melakukan sosialisasi politik untuk masyarakat dengan bijak menggunakan hak pilihnya sedangkan yang di kaji dalam penelitian ini adalah partai politik yang memiliki tujuan ingin menarik masyarakat untuk memilih partai, sedangkan persamaannya adalah sosialisasi dalam pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

#### **F. Kerangka Teori**

Secara spesifik, teori merupakan rangkuman abstrak dari berbagai fenomena yang dikemukakan oleh pengarang untuk menganalisis masalah yang akan diteliti. Hal ini terkait dengan pemecahan masalah yang akan dilihat dalam penelitian. Penelitian ini akan mendeskripsikan, membahas fenomena dan fakta kebijakan politik, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif dan komparatif.

## 1. Kekuasaan Politik

Menurut Robert A. Dahl (1974: 407) yang mengemukakan bahwa: "kekuasaan mencakup kategori hubungan kemanusiaan yang luas, misalnya hubungan yang berisi pengaruh, otoritas, persuasi, dorongan, kekerasan, tekanan, dan kekuatan politik". Kemudian dalam karyanya yang berjudul "Modern Political Analysis", ia mengatakan bahwa kekuasaan adalah sejenis pengaruh yang disertai dorongan berupa sanksi bagi yang melanggar. Dari kedua pengertian istilah ini tidak konsisten karena pernyataan pada pertama konsep kekuasaan bersifat umum karena mencakup segala jenis hubungan kemanusiaan yang disertai pengaruh dan sanksi. Hal ini oleh Dahl tidak dipersoalkan karena istilah "politik" termasuk istilah "control", "power", "authority", dan "influence" yang mempunyai arti sukar dipahami.

Menurut Miriam Budiardjo mengatakan bahwa: "keabsahan (legitimasi) adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa kekuasaan yang ditujukan kepada mereka itu adalah wajar dan patut dihormati berdasarkan persepsi bahwa penyelenggaraan kekuasaan itu sesuai dengan azas dan prosedur yang telah menjadi tradisi dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang sah. Ini menggambarkan bahwa legitimasi kekuasaan politik tergantung pada faktor pengakuan masyarakat dan aturan-aturan hukum yang sah, seperti negara Indonesia yang memproklamasikan

kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Hal ini berarti bahwa kekuasaan dapat memberikan relevansinya atas stabilitas dan kelangsungan kekuasaan politik itu sendiri. Di mana hal itu dikarenakan dengan keabsahan tersebut pemerintah dapat menuntut kepatuhan rakyat yang hanya mungkin diberikan oleh rakyat jika mereka mempunyai kepercayaan kepada pemerintah (Nambo & Puluhuluwa, 2005).

## 2. Partai Politik

Partai politik merupakan berasal dari kata latin, yaitu partai yang berasal dari kata “partire” yang bermakna membagi, sedangkan politik yang berasal dari kata “politic” menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Pandangan Robert huckson mengenai partai politik adalah sebuah kelompok kecil orang-orang yang memiliki kemerdekaan dan mereka memiliki otonomi tersendiri di dalamnya. Secara eksistensial, partai politik sebagai alat yang sah bagi kelompok-kelompok otonom ini untuk mengikuti suatu perayaan berkala untuk merebut kekuasaan, pemilihan umum (Jurdi, 2020).

## 3. Fungsi Partai Politik

ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pun secara tegas telah mengatur fungsi dan peran yang harus dijalankan oleh partai politik di Indonesia diantaranya; (a) sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia

yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (b) sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara; (c) sebagai sarana partisipasi politik warga Negara Indonesia; dan (d) sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender (Kurniawan and Handayani, 2022)

#### 4. Sosialisasi Politik

Pendidikan politik dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *political socialization*, *political education*. Istilah *political socialization* jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia bermakna sosialisasi politik. Di kalangan akademis, para ahli juga sering mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah sosialisasi politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit.

Surbakti (1999: 117) membagi sosialisasi politik dalam dua bagian, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik di antara pemberi dan penerima pesan. Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialog

baik pada lingkungan sekolah, pemerintah, maupun partai politik dalam rangka pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai, norma, dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik. Sedangkan indoktrinasi politik ialah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik (Hermawan, 2020).

## 5. Pemilu

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat. .

Menurut Heywood pemilu adalah ‘jalan dua arah’ yang disediakan untuk pemerintah dan rakyat, elit dan massa dengan kesempatan untuk saling mempengaruhi. Pemilu adalah ‘jalan dua arah’ seperti yang ada pada semua saluran komunikasi politik. Sebagai ‘jalan dua arah’ fungsi pemilu secara garis besar terumuskan dalam 2 (dua) perspektif bottom-up dan top-down.

Dalam perspektif bottom-up pemilu dilihat sebagai sarana politisi dapat dipanggil untuk bertanggungjawab dan ditekan untuk mengantarkan bagaimana kebijakan merefleksikan opini publik.

Termasuk dalam fungsi bottom-up diantaranya adalah fungsi pemilu sebagai: pertama, rekrutmen politisi. Dalam perspektif top-down, pemilu dilihat sebagai sarana elit melakukan kontrol terhadap rakyat agar tetap tanpa gerak/diam (quiescent), dapat ditundukkan (malleable), dan pada akhirnya dapat diperintah (governable). Fungsi ini biasanya terjadi terkait dengan penguasa-penguasa otoriter.

## **G. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, dengan demikian metode penelitian merupakan cara atau alat yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab serangkaian pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah.

### **a) Metodologi Penelitian**

Berhubungan dengan judul yang diambil penulis, maka digunakanlah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian Kualitatif merupakan bidang antar disiplin, lintas disiplin, dan kadang-kadang kontra disiplin, penelitian berusaha mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.(Paulus & Rusdin, 2018) Penelitian Kualitatif Deskriptif dilakukan dengan cara menjelaskan berbagai fenomena Internasional yang terjadi sesuai dengan sifatnya yang dinamis dan dapat berubah-ubah (Nurhalizah, 2019).

**b) Pendekatan Penelitian**

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang (Noor, 2011). Dalam penelitian deskriptif ini terpusat pada masalah aktual yang ada sebagaimana yang terjadi pada saat penelitian berlangsung.

**c) Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data tertulis, karena dengan data tertulis peneliti dapat diperoleh dari wawancara, jurnal, penelitian, arsip, dan dokumentasi. Sumber.

## 1) Data Primer

Sumber data Primer pada penelitian ini berupa hasil Wawancara.

## 2) Data Skunder

Sumber data sekunder dalam penelitian sama halnya dengan Data Primer yaitu melalui sumber data dokumentasi. Dokumentasi adalah sumber data yang diperoleh melalui dari sumber yang lain yakni catatan dari lembaga atau organisasi, buku, jurnal, arsip, ataupun laporan seseorang. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku, literature, dan dokumen.

#### **d) Tehnik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- **Wawancara**

Studi Wawancara merupakan pedoman yang di pergunakan dalam proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dan informan atau subjek penelitian.(Paulus and Rusdin 2018) Pada penelitian ini yang di wawancara oleh peneliti adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Ogan Komering Ilir.

- **Dokumentasi**

Dokumentasi adalah sumber data yang diperoleh melalui dari sumber yang lain yakni catatan dari lembaga atau organisasi, buku, jurnal, arsip, ataupun laporan seseorang.

#### **e). Tehnik Analisi Data**

Teknik analisis data menurut Sugiyono (2012, hlm. 244), merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan (Limantara, 2014).

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan digunakan untuk mendapat gambaran yang terperinci dan untuk mempermudah isi dari pada skripsi ini, sehingga penulis membagi sistematika penulisan ke dalam 4 bab, yaitu:

1. BAB I : Pendahuluan, pada sub bab ini pada menguraikan latar belakang yang mendasari penelitian, kemudian diidentifikasi masalah melalui rumusan masalah. Termasuk pula dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian, lalu terdapat tinjauan pustaka dan kerangka teori sebagai acuan penelitian, serta metode penelitian yang menjelaskan pendekatan, data dan jenis data teknik pengumpulan, teknik analisis data serta sistematika penulisan.
2. BAB II: Kajian Kepustakaan Yang Relevan, Pada sub bab ini dibahas mengenai teori yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian ini. Berisi mengenai Kekuasaan Politik, Partai Politik, Fungsi Partai Politik, sosialisasi politik dan Pemilu.
3. BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian, pada sub bab ini menjelaskan tentang Partai Demokrat yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. BAB IV : : Hasil dan Pembahasan, Pada sub bab menjelaskan mengenai Strategi sosialisasi Partai Politik untuk mensukseskan tiga agenda besar Partai Demokrat pada Kontestasi Pemilu tahun 2024.
5. BAB V : Penutup pada sub bab ini menyimpulkan pembahasan mengenai penelitian yang telah dilakukan sekaligus menjadi penutup Serta hasil dari pengaruh fenomena tersebut.